

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA SEI BELUTU KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Melani Tionida Rajagukguk¹, Maringan Panjaitan², Jonson Rajagukguk³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: melani.rajagukguk@student.uhn.ac.id

Email: maringan.panjaitan@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of PKH implementation in poverty alleviation efforts in Sei Belutu Village, Sei Bambi District, Serdang Bedagai Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation of beneficiaries, PKH facilitators, and other related parties. The results of the study indicate that PKH has a positive impact in increasing access to education for children from poor families and encouraging the use of health facilities, especially for pregnant women and toddlers. In addition, PKH also helps ease the economic burden of beneficiary families. However, the effectiveness of the implementation of this program still faces a number of obstacles, such as delays in disbursement of funds, lack of public understanding of the obligations that must be fulfilled as recipients of assistance, and inaccuracy in targeting recipients. Lack of supervision and assistance are also factors that influence the success of this program in achieving its main objectives. Based on the research findings, improvements are needed in the PKH implementation mechanism, including increasing socialization to beneficiaries, accelerating the disbursement process, and strengthening the monitoring and evaluation system so that this program can run more optimally and effectively in alleviating poverty in Sei Belutu Village

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Poverty Alleviation, Sei Belutu Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penerima manfaat, pendamping PKH, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, PKH juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan, serta masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima. Kurangnya pengawasan dan pendampingan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan PKH, termasuk peningkatan sosialisasi kepada penerima manfaat, percepatan proses pencairan dana, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sei Belutu.

Kata kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan, Desa Sei Belutu.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



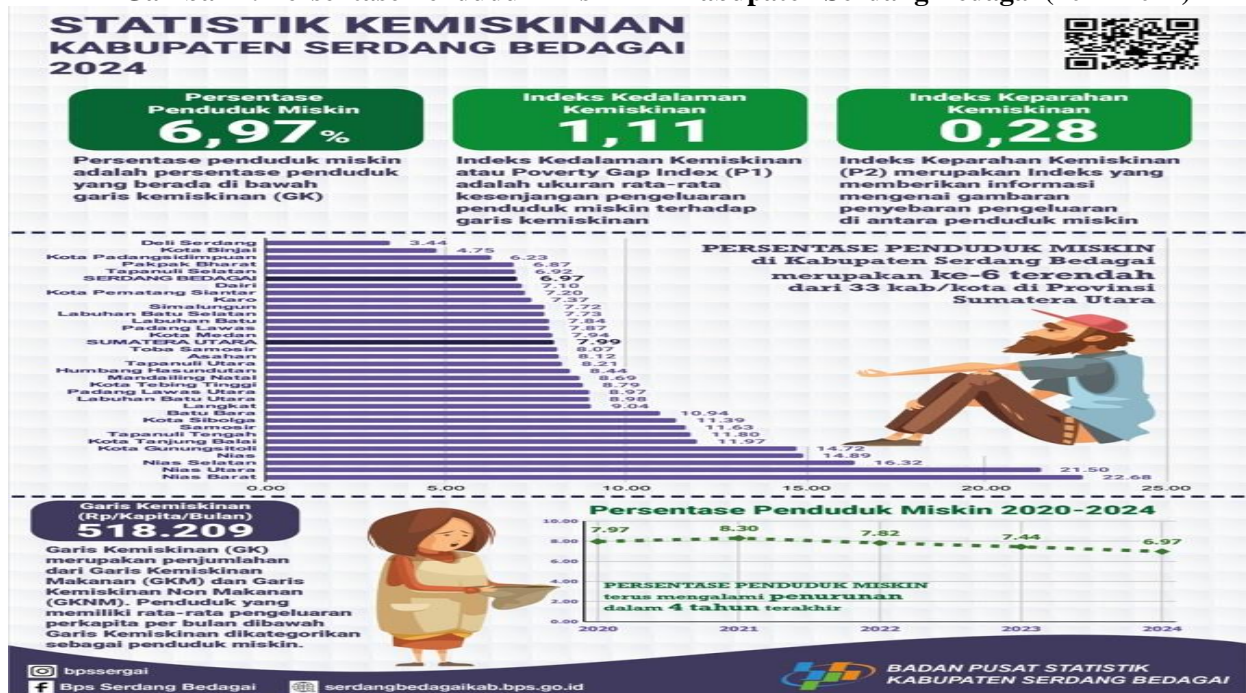
PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup aspek ketidakadilan sosial, akses terhadap peluang, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup. Ada dua konteks yang menggambarkan kemiskinan, yang pertama yaitu dalam konteks absolut dimana kemiskinan menggambarkan situasi di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, sedangkan konteks kedua yaitu relatif yang menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang dianggap layak di dalam masyarakat tertentu. Berbagai faktor, seperti pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang terbatas, dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, berkontribusi pada keberlanjutan kemiskinan.

Berdasarkan rumusan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, salah satunya upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan meminimalisir warganya yang berada dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai program mulai dari yang sifatnya bantuan sosial, pemberdayaan sampai kepada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan. Salah satu program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dalam pasal 2 menyebutkan tujuan dari Program Keluarga Harapan antara lain untuk: Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat Melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Gambar 1: Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Serdang Bedagai (2021-2024)



Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Kecamatan Sei Bamban adalah satu dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai. Luas wilayah Kecamatan Sei Bamban adalah 72,26 km² atau sebesar 3,80% dari luas Kabupaten Serdang Bedagai. Kecamatan ini terbagi menjadi 10 Desa yaitu Desa Sei Bamban, Desa Gempolan, Desa Bakaran Batu, Desa Sukadamai, Desa Sei Bamban Estate, Desa Penggalangan, Desa Pon, Desa Rampah Estate, dan Desa Sei Belutu. Desa Sei Belutu ini merupakan daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi yang masih rendah dan menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak tersebut. Banyak keluarga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Di desa Sei Belutu ini, kebanyakan orang tua yang bekerja di sektor pertanian dan buruh harian, yang berpenghasilan tidak menentu.

Dari gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2020- 2024 mengalami penurunan di setiap tahunnya, Pada tahun 2020 dengan jumlah 7,97%, tahun 2021 dengan jumlah 8,30%, dan 2022 dengan jumlah 7,82%, di tahun 2023 berjumlah 7,44%, dan tahun 2024 dengan jumlah 6,97%. Yang dimana penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan perkapita per bulan di Serdang Bedagai adalah Rp. 518.209.(BPS Kabupaten Serdang Bedagai)

Tabel 1: Jumlah Penduduk (2021-2024)

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai (Jiwa)	Jumlah Penduduk Kecamatan Sei Bamban (Jiwa)
2021	657,490	46,043
2022	336,597	46,741
2023	343,862	46,661
2024	690,72	47,282

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 2: Jumlah Penerima PKH Di Desa Sei Belutu

No	Desa	Jumlah Penerima PKH
1	Sei Belutu	223
2	Gempolan	188
3	Bakaran Batu	179
4	Suka Damai	234
5	Sei Bamban Estate	65
6	Sei Buluh	103
7	Sei Bamban	256
8	Penggalangan	240
9	Desa Pon	229
10	Sei Rampah Estate	63
	Jumlah	1.780

Sumber: Pendamping PKH Sei Belutu

Jumlah penerima PKH di Desa Sei Belutu berdasarkan tabel diatas sebanyak 1.780 jiwa dengan jumlah penerima tertinggi berada di Desa Sei Bamban sebanyak 256 jiwa dan jumlah penerima PKH terendah berada pada Desa Sei Rampah Estate sebanyak 63 jiwa.

Tabel 3: Kategori Penerima PKH

Kategori	Jumlah
Ibu Hamil	0
Balita	0
SD	52
SMP	54
SMA	67
Lansia	44
Disabilitas	6
Total	223

Sumber: Pendamping PKH Sei Belutu

Berdasarkan tabel diatas dari sumber pendamping PKH Desa Sei Belutu penerima manfaat PKH yang terbanyak adalah kategori anak SMA dengan jumlah 67 peserta, dan penerima manfaat PKH dengan kategori terkecil yaitu disabilitas dengan jumlah 6 peserta. Jika Dilihat Dari latar belakang diatas diketahui bahwa masih banyak masalah dalam pelaksanaan PKH, salah satunya mengenai ketidaktepatan sasaran dalam memilih penerima bantuan PKH. Maka dasar permasalahan tersebut Penulis Tertarik mengambil judul :” Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai).”

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan pada tab sebelumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:1) menjelaskan bahwa, ”penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Untuk mendapatkan informan dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.

PEMBAHASAN

Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga harapan berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera di bentuk tim pengendali program keluarga harapan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, program keluarga harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai bantuan dana sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Secara umum tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi angka kemiskinan, serta mengubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang memberikan dukungan peningkatan taraf kesejahteraan. Tujuan khusus PKH yaitu:

- a. PKH bertujuan untuk membantu kelompok sangat miskin untuk mencukupi kebutuhan kesehatan serta pendidikan, selain memberi kemampuan bagi keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- b. PKH diharapkan mampu merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, serta mengirim anak ke sekolah serta fasilitas kesehatan.
- c. PKH diharapkan mampu memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi untuk jangka panjang.

Kriteria Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Mulai tahun 2012 basis bantuan PKH diarahkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (ayah, ibu dan anak). Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Peserta PKH adalah KPM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak SD/MI atau sederajat
 - b. Anak SMP/MTS atau sederajat
 - c. Anak SMA/MA atau sederajat
 - d. Anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kewajiban menurut KBBI merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang diwajibkan serta keharusan. Sehingga peserta PKH yang mendapatkan bantuan haruslah melaksanakan kewajibannya. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan dan Wilayahnya Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa yang menjadi sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa:

- a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) akses merupakan keluarga dan seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu dalam penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH) akses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, perbatasan antar negara.

Sasaran penerima dana program keluarga harapan adalah seperti tabel di bawah:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Tabel 4: Sasaran Penerima Dana Program Keluarga Harapan Tahun 2024

No	Sasaran	Dana yang dikeluarkan/Tahun
1	Ibu hamil/nifas	Rp. 3.000.000
2	Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp. 3.000.000
3	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000
4	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6	Penyandang Disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber: Kemensos, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sasaran penerima dari dana PKH adalah Ibu hamil/nifas sebesar Rp 3.000.000, anak usia dini 0-6 tahun sebesar Rp 3.000.000, Pendidikan anak SD menerima bantuan PKH sebesar 900.000, Pendidikan anak SMP/ sederajat menerima sebesar Rp 1.500.000, Pendidikan anak SMA/ sederajat menerima sebesar Rp 2.000.000, penyandang disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp 2.400.000 dan lanjut usia sebesar Rp 2.400.000. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD atau sederajat, anak SMP atau sederajat, anak SMA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Setiap perubahan yang terjadi dalam suatu skenario atau situasi disebut sebagai dampak. Dampak tidak hanya untuk hal-hal “baik”. Melalui dampak berarti melihat dampak yang diinginkan dan yang tidak diinginkan yakni positif dan negatif serta apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Seperti diketahui, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program jaminan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggota Rumah Tangga Sangat Miskin juga harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Tidak seorang pun merasa kurang beruntung akibat program pemerintah ini; semua orang, termasuk mereka yang bukan peserta, bangga akan hal itu, dan semua orang sepakat bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat apalagi untuk biaya pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci terbesar dalam meraih kesuksesan. Ada dua dampak yang ditimbulkan yaitu: Yang pertama dampak positif adalah meringankan beban pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Anak-anak Penerima Program tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Ada juga dampak negatif yaitu: bantuan yang diberikan salah sasaran.

Landasan Hukum Program Keluarga Harapan.

Pada tahun 2018 Kementerian sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan mencabut dan tidak memperlakukan peraturan menteri sosial nomor 10 tahun 2017 tentang program keluarga harapan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940). Peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan diterbitkan dengan pertimbangan:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan

- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi Kebutuhan Program Keluarga Harapan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan

Pengertian Kemiskinan

Miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan merupakan sebuah standar tingkat hidup yang rendah, yakni terdapat sebuah tingkat kurangnya materi di sejumlah ataupun segolongan orang dibandingkan standart kehidupan pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Secara langsung standar kehidupan yang rendah akan tampak pengaruhnya terhadap tingkat kehidupan moral, kondisi kesehatan serta rasa harga diri.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas kemiskinan dari pada besar rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan guna mencukupi kebutuhan minimum makanan serta tidak makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan dipatok 2.100 kalori per hari dan kebutuhan minimum tidak makanan yang terdiri atas pengeluaran untuk sandang, perumahan dan beragam barang serta jasa. Kemiskinan termasuk persoalan yang selalu menarik diangkat menjadi perbincangan, walaupun banyak program penuntasan kemiskinan, tetapi hingga saat ini masalah kemiskinan belum seluruhnya dapat teratasi. Dimana dasar yang menjadi penyebabnya seperti benang kusut yang saling berkaitan satu sama lain, menjadikannya tidak mudah untuk memutuskan rantainya.

Adapun penyebab kemiskinan menurut segi ekonomi yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan timbul sebab terdapat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang.
- b. Kemiskinan muncul karena tidak samanya kualitas sumberdayamasyarakat. Todaro menyebutkan bahwa adanya hubungan negatif kemiskinan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yaitu perangkat guna mengukur tingkat kesejahteraan antar Negara maupunantardaerah.
- c. Kemiskinan muncul karena tidak samanya akses pada modal. Terdapat ketidak sempurnaan pasar, keterbelakangan serta kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya investasi serta tabungan. Berdasarkan teori Neo-liberal kemiskinan dapat hilang apabila kekuatan pasar di perluas sebesar-besarnya serta pertumbuhan ekonomi dipacu setinggitingginya.

Bentuk-Bentuk Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut yaitu keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhsn pokoknya seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini dukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*proverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran), sehingga seseorang atau kelompok yang kemampuan ekonominya di bawah garis kemiskinan, dapat dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

2. Kemiskinan Relative

Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang dalam individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita setiap bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolut dikategorikan tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata mesasyarakat setempat adalah Rp.200.000 per bulan, maka secara relative orang tersebut dalam kategori miskin

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat modern. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs achievement*), fatalis, berorientasi kemasa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan ciri dari kemiskinan dalam kategori kultural.

4. Kemiskinan Structural

Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Adanya praktik monopoli, dalam bidang ekonomi, akan menghasilkan mata rantai pemiskinan yang sulit dipecahkan. Sekuat papaun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur yang demikian tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya. Karena aset dan akses terhadap sumber-sumber telah dikuasai oleh segolongan orang tertentu.

Indikator Kemiskinan

Terdapat beberapa macam indikator kemiskinan yaitu:

a. Tingkat konsumsi beras

Sajogyo mengatakan tingkat konsumsi beras menjadi indikator kemiskinan pada daerah pedesaan, penduduk mengkonsumsi beras kurang dari pada 240 kg perkapita per tahun maka tergolong miskin. Kemudian 360 kg perkapita per tahun untuk daerah perkotaan.

b. Tingkat Pendapatan

BPS menentukan pendapatan di daerah perkotaan yang dibutuhkan guna terlepas dari golongan miskin lebih besar perkapitanya. Sedangkan di pedesaan pendapatan yang diperlukan lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Terjadinya perbedaan disebabkan kebutuhan di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan, serta di daerah pedesaan harga-harga lebih murah dari pada di daerah perkotaan.

c. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Terdapat beragam komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang biasanya digunakan yakni konsumsi makanan serta gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, kesempatan kerja, rekreasi, jaminan sosial

Indikator Upaya Pengentasan Kemiskinan

Indikator-indikator yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- Intelligence* (kecerdasan), Indikator ini dinilai berdasarkan tingkatan pendidikan kepala keluarga, dan tingkat pendidikan tertinggi anggota keluarga di rumah tangga tersebut.
- Inisiatif* (inisiatif), Indikatornya adalah responden mengetahui dan memahami persoalan di lingkungan tempat tinggalnya, serta ada tidaknya usaha untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
- Individuality* (kepribadian), Indikator ini dinilai berdasarkan sikap responden dan anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- Skill* (keahlian), Indikatornya ini dinilai berdasarkan kesesuaian antara keahlian yang dimiliki responden dengan pekerjaan yang saat ini digeluti.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Belutu adalah serangkaian langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Upaya ini mencakup berbagai program seperti pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5



keterampilan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan di Desa Sei Belutu bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa. Adapun indikator Upaya Pengentasan Kemiskinan yaitu *Intelligence* (Kecerdasan), *Inisiatif* (Inisiatif), *Individuality* (Kepribadian), dan *Skill* (Keahlian)

a. *Intelligence* (Kecerdasan)

Intelligence (Kecerdasan) ini dinilai berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarga, dan tingkat pendidikan tertinggi anggota keluarga di rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga lansia tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samuel Lumban Raja selaku pendamping PKH mengatakan:

“Saya sudah cukup lama menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan kalau ditanya soal kecerdasan dalam pengentasan kemiskinan, saya bisa bilang ini faktor yang sangat menentukan. Tapi, kecerdasan yang saya maksud bukan hanya soal sekolah tinggi atau nilai akademik yang bagus. Kecerdasan di sini lebih luas bagaimana seseorang bisa beradaptasi, mengambil keputusan yang tepat, dan memanfaatkan peluang untuk keluar dari kemiskinan.”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Ristamawati Sitorus sebagai penerima PKH mengatakan:

“Jadi buat saya, kecerdasan itu memang jadi penentu. Orang yang bisa berpikir ke depan, bisa melihat peluang, dan mau belajar, mereka yang lebih cepat keluar dari kemiskinan. Bantuan itu penting, tapi kalau kita nggak pakai kecerdasan buat mengelolanya, ya kita akan terus di tempat yang sama.”

Dari dua perspektif diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, kecerdasan di sini bukan hanya tentang akademik atau pendidikan formal, tetapi lebih kepada kecerdasan dalam mengambil peluang, mengelola sumber daya, serta membangun pola pikir yang lebih maju dan mandiri. Bantuan sosial memang dapat menjadi dorongan awal, tetapi tanpa kecerdasan untuk mengelolanya dan mengambil langkah ke depan, penerima manfaat akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kecerdasan menjadi indikator penting dalam menentukan apakah seseorang dapat keluar dari kemiskinan atau tidak.

b. *Inisiatif* (Inisiatif)

Inisiatif (Inisiatif) bertujuan untuk mengetahui dan memahami persoalan di lingkungan tempat tinggalnya, serta ada tidaknya usaha untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samuel Lumban Raja selaku pendamping PKH mengatakan:

“Sebagai pendamping, saya tidak hanya sekedar mendampingi dalam pencairan bantuan, tapi juga berusaha membangun kesadaran bahwa kemiskinan bisa dikalahkan dengan usaha dan semangat pantang menyerah. Bantuan PKH adalah jembatan, tapi langkah menuju perubahan harus datang dari diri mereka sendiri. Dan ketika saya melihat ada keluarga yang berhasil bangkit, saya merasa bahwa tugas saya sebagai pendamping benar-benar berarti.”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Nurmiati Sitorus sebagai penerima PKH mengatakan:

“Bagi saya, inisiatif itu penting. Kalau hanya mengandalkan bantuan tanpa ada usaha, hidup tidak akan berubah. Saya ingin anak-anak saya melihat bahwa ibunya berusaha, agar mereka juga semangat mengejar masa depan yang lebih baik.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Inisiatif merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan

dukungan awal yang sangat berarti, perubahan yang nyata dalam kehidupan penerima manfaat terjadi ketika mereka mulai mengambil langkah-langkah aktif untuk mengubah keadaan mereka. Seperti yang diceritakan oleh penerima PKH dan pendamping, keberanian untuk mencoba, berusaha mandiri, dan berbagi pengetahuan serta keterampilan dengan orang lain menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Inisiatif dan usaha yang gigih akan membuka peluang baru, mengarah pada kesejahteraan yang lebih baik, dan menciptakan efek positif yang lebih luas dalam komunitas.

c. *Individuality* (Kepribadian)

Individuality (Kepribadian) dinilai berdasarkan sikap responden dan anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samuel Lumban Raja selaku pendamping PKH mengatakan:

“Sebagai pendamping PKH saya percaya bahwa salah satu kunci keberhasilan program ini adalah dengan memperkenalkan mereka pada konsep individuality keunikan masing-masing individu. Setiap keluarga memiliki kekuatan dan bakat mereka sendiri yang bisa digali. Kesuksesan dalam pengentasan kemiskinan, menurut saya, bukan hanya soal menambah bantuan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk menggali potensi dalam diri mereka. Kepribadian yang terbuka, penuh kasih, dan sabar menjadi penghubung penting dalam proses ini.”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Pelen Gultom sebagai kepala desa mengatakan:

“Saya melihat bahwa dalam pengentasan kemiskinan, kita tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membantu individu mengenali potensi dalam diri mereka dan memotivasi mereka untuk keluar dari zona nyaman. Kepribadian yang kuat dan penuh harapan adalah kunci perubahan, baik bagi mereka maupun bagi desa.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan yang efektif tidak hanya melibatkan bantuan finansial, tetapi juga perubahan dalam kepribadian dan pola pikir individu. Kepribadian yang kuat, penuh harapan, dan percaya diri adalah kunci untuk membantu individu dan keluarga mengatasi tantangan ekonomi dan beralih menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

d. *Skill* (Keahlian)

Skill (Keahlian) dinilai berdasarkan kesesuaian antara keahlian yang dimiliki responden dengan pekerjaan yang saat ini digeluti.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samuel Lumban Raja selaku pendamping PKH mengatakan:

“Melalui pendekatan ini, saya berharap setiap keluarga yang saya dampingi tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Saya selalu menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, antara pemerintah, masyarakat, dan tentunya, keluarga itu sendiri.”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Tiurmina Batubara sebagai penerima PKH mengatakan:

“Dengan bantuan PKH dan pendampingan yang saya terima, saya merasa bahwa hidup saya dan keluarga mulai berubah. Kami kini memiliki harapan lebih besar untuk masa depan, terutama untuk anak-anak. Saya tidak hanya menerima bantuan, tapi juga belajar banyak hal yang membuat saya lebih siap menghadapi tantangan hidup dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui PKH menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan hanya soal pemberian uang, tetapi juga tentang membekali keluarga miskin dengan keterampilan, pengetahuan, dan akses yang dibutuhkan untuk memperbaiki

kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Keberhasilan program PKH sangat bergantung pada kolaborasi antara pendamping, penerima manfaat, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Program ini berhasil membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, akses layanan kesehatan, serta meningkatkan daya beli rumah tangga miskin. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya pendampingan yang optimal kepada peserta program. Selain itu, tingkat ketergantungan terhadap bantuan juga menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas PKH di Desa Sei Belutu, diperlukan upaya perbaikan dalam mekanisme seleksi penerima manfaat, peningkatan peran pendamping sosial, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat lebih mandiri secara finansial. Dengan langkah-langkah ini, PKH dapat lebih optimal dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ade Kusumawardani, (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*
- Apando Ekardo, Firdaus, Nilda Elfemi (2014) *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamagan* 3(1),1-9
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kemiskinan Indonesia 2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Bappenas. (2018). *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas
- Creswell,. (2019). *Resign Design, Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djabar, D.A., Olilingo, F. Z., Santoso, I. R., (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonou Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango*. EKOMBIS. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2)
- Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2014) *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Peningkatan Kemiskinan (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)* Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Hasna, Nurma Mustika, Nurhadji Nugraha, and Indriyana Dwi Mustikarini. "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.2 (2020):108-116
- Mutia Harahap, (2022). *Analisis Dampak Penerapan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan*. Diss, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
- Nurinda Ibrahim, Ramli Mahmud, Sastro M. Wantu (2023). *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), Hlm. 5360-5370
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Rizki Rigeras Aldzuhri D (2021) *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal
- Sarah Nanda Syahputri (2022) *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Kec. Medan Labuhan) Universitas Sumatera Utara

Sugiyono, (2010), *Teknik Analisis Data* (Bandung: Afiabeta)

Wulandari, Fiolita Nur. (2022) *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus*. Skripsi Dipublikasikan. Lampung, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi ,UIN Raden Intan Lampung.

Zainal Abidin Matondang (2022) *Analisis Efektivitas Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Penerima PKH di Kelurahan Padangmatinggi Lestari)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

